



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 134/TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) PERUBAHAN
BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2 -1 Tahun 2025 dan menjadi pedoman bagi APIP Daerah dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. bahwa dengan adanya efisiensi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu dilakukan perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko terkait lingkup dan jangka waktu pemeriksaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Perubahan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengawasan Inspektorat atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
19. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
20. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;

21. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Perubahan Berbasis Risiko Inspektorat Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan PKPT Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEEMPAT : Penerbitan dan Penandatanganan Surat Tugas atas Pelaksanaan PKPT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU didelegasikan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 21 April 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 134 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
PERUBAHAN (PKPT) BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2025

A. PENDAHULUAN

Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah proses kegiatan pembinaan dan pengawasan intern yang memiliki tujuan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan, rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan dan akuntabel.

Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengawasan Inspektorat atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Guna mewujudkan Tujuan ke-5 Bupati Kepulauan Mentawai, yakni Terwujud Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan Melayani serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu menyusun skala prioritas sasaran pengawasan secara tepat, aktual dan relevan.

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai harus mampu merespon dengan memberikan jaminan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) secara cepat dan tepat, serta efektif dan efisien berbagai permasalahan yang terjadi dalam rangka memberi masukan kepada pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif, serta akuntabel pada tingkat strategis dan operasional sehingga perlu ditetapkan Program Kerja Pengawasan yang disusun sesuai dengan prioritas berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko.

Berdasarkan pada paradigma tersebut, serta mengacu pada beberapa regulasi pengawasan dan sinkronisasi kegiatan pengawasan dengan mengutamakan keterpaduan dan keselarasan dengan program pengawasan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat serta pengawasan oleh instansi pengawasan eksternal, maka Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Kepulauan Mentawai memerlukan suatu Program Kerja Pengawasan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang tertuang dalam suatu Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), *assurance* dan *consulting*:

1. *Assurance*, berupa:
 - ✓ Reviu;
 - ✓ Evaluasi;
 - ✓ Monitoring;
 - ✓ Audit.
2. *Consulting*, berupa:
 - ✓ Pendampingan;
 - ✓ Fasilitasi;
 - ✓ Konsultasi.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.

C. TUJUAN

Berdasarkan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai menyusun program kerja pengawasan tahun 2025 dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan;
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
3. Menetapkan prioritas pengawasan yang bersifat strategis dan bermanfaat dalam rangka pencapaian tujuan pemerintah daerah secara ekonomis, efisien dan efektif serta meminimalkan risiko yang berdampak pada pencapaian tujuan organisasi; dan
4. Meningkatkan Tata Kelola perangkat daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan.

D. KEGIATAN PENGAWASAN

1. Kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, meliputi:
 - a. Telaah sejawat internal dan eksternal;
 - b. Bimbingan teknis, workshop, pelatihan kantor sendiri dalam rangka peningkatan Kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Fungsional.
2. Kegiatan Reviu, meliputi:
 - a. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. Reviu Kebijakan Umum dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
 - c. Reviu Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah;
 - d. Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
 - e. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - f. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - g. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - h. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - i. Reviu Standar Satuan Harga;
 - j. Reviu Standar Biaya;
 - k. Reviu Jaminan Kesehatan Nasional;
 - l. Reviu Benturan Kepentingan

- m. Reviu Penerapan Standar Pelayanan Minimal
 - n. Reviu E-Purchase
 - o. Reviu Optimalisasi Poksi Penanganan Pengaduan
 - p. Reviu Harga perkiraan Sendiri;
 - q. Reviu Kepatuhan P3DN
 - r. Reviu Dana Alokasi Khusus;
 - s. Reviu Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - t. Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa
 - u. Reviu Penutupan Kas;
 - v. Reviu Tata Kelola Manajemen ASN.
3. Kegiatan Evaluasi, meliputi:
 - a. Evaluasi Tata Kelola Manajemen ASN;
 - b. Evaluasi Pengelolaan Air Minum;
 - c. Evaluasi Tata Kelola Desa / Bantuan Keuangan;
 - d. Evaluasi Tata Kelola Pengawasan APIP
 - e. Evaluasi Zona Integritas;
 - f. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - g. Evaluasi Penjaminan Kualitas PM SPIP Perangkat Daerah;
 - h. Evaluasi RR dan RTP;
 - i. Evaluasi Reformasi Birokrasi.
 4. Monitoring, meliputi:
 - a. Monitoring Penanganan Inflasi atau Pemantauan Harga;
 - b. Monitoring dan Evaluasi BOS;
 - c. Monitoring TLHP BPK RI;
 - d. Monitoring TLHP APIP;
 - e. Monitoring dan Evaluasi Stunting.
 5. Audit, meliputi:
 - a. Audit Kinerja atas Program Pemberdayaan Sosial;
 - b. Audit Ketaatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - c. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
 - d. Pengawasan Desa;
 - e. Probit Audit.
 6. Konsultansi, meliputi:
 - a. Pendampingan MCP KPK, Survei Penilaian Integritas, UPG dan Pelaporan LHKPN;
 - b. Pendampingan PM SPIP Terintegrasi;
 - c. Pendampingan Penertiban BMD;
 - d. Pendampingan Zona Integritas;
 - e. Pendampingan Penyusunan Risk Register dan Rencana Tindak Pengendalian.

E. SASARAN PENGAWASAN

Adapun Sasaran Pengawasan pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Penganggaran daerah;
2. Pendapatan Asli Daerah (Pajak dan Retribusi);
3. Pengentasan Kemiskinan;
4. Penanganan Stunting;
5. Hibah dan Bantuan Sosial;
6. Pelayanan Perizinan;
7. Layanan Publik atau Standar Pelayanan Minimal;
8. Peningkatan Kapasitas Aparatur Intern Pengawas Pemerintah;
9. Pengawasan Desa;
10. Pengadaan Barang dan Jasa.

F. PELAKSANAAN PENGAWASAN

Adapun kegiatan pengawasan yang akan dilakukan pada tahun 2025, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

G. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan Perubahan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun Anggaran 2025 untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pengawasan dan fungsi Inspektorat sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Pelaksana	Volume	Jadwal		Hari Pemeriksaan						Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
							RMP	RPL	PJ	WP	PT	KT	AT	Jml				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)						(10)	(11)	(12)	(13)
1	Reviu RKPD TA 2026 dan RKPD perubahan TA 2025 oleh APJP	Reviu	Meningkatnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretariat	2	Minggu II Juni, Minggu II Juli	Minggu III Juni, Minggu III Juli	0	8	8	8	32	56	8.400.000	2	Laptop, ATK, printer	-
2	Reviu KUA-PPAS TA 2026 dan KUA-PPAS Perubahan TA 2025	Reviu	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Sementara Anggaran (KUA-PPAS Murni dan Perubahan)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretariat	2	Minggu III Juni, Minggu III Juli	Minggu IV Juni, Minggu IV Juli	0	8	8	8	32	56	8.400.000	2	Laptop, ATK, printer	-
3	Reviu RKA TA 2026 dan RKA Perubahan TA 2025 oleh APJP	Reviu	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Rencana Kerja Anggaran SKPD)	Seluruh OPD	Irban Wilayah 1, 2, 3, 4	8	Minggu II Agustus, Minggu III Agustus	Minggu III Agustus, Minggu IV Agustus	0	32	32	32	128	224	33.600.000	70	Laptop, ATK, printer	-
4	Reviu LK OPD	Reviu	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan SKPD	Seluruh OPD	Irban Wilayah 1, 2, 3, 4	4	Minggu I Maret	Minggu II Maret	0	16	16	16	64	112	16.800.000	36	Laptop, ATK, printer	-
5	Reviu LKPD TA 2024 oleh APJP	Reviu	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Badan Keuangan Daerah	Sekretariat	1	Minggu II Maret	Minggu III Maret	0	4	4	4	16	28	4.200.000	1	Laptop, ATK, printer	-
6	Reviu LPPD	Reviu	Meningkatnya Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat	1	Minggu II Maret	Minggu III Maret	0	4	4	4	16	28	4.200.000	1	Laptop, ATK, printer	-
7	Reviu LAKIP/LKJP	Reviu	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat	1	Minggu II Maret	Minggu III Maret	0	4	4	4	16	28	4.200.000	1	Laptop, ATK, printer	-
8	Reviu RPJMD	Reviu	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretariat	1	Minggu IV September	Minggu I Oktober	0	4	4	4	16	28	4.200.000	1	Laptop, ATK, printer	-

9	Reviu SSH	Reviu	Meningkatnya Standar Satuan Harga	Sekretariat Daerah	Irban Khusus	1	Minggu II Agustus	Minggu III Agustus	0	4	4	4	4	16	28	4.200.000	1	Laptop, ATK, printer	-
10	Reviu SAB	Reviu	Meningkatnya Standar Anggaran Biaya	Badan Keuangan Daerah	Irban Khusus	1	Minggu I September	Minggu II September	0	4	4	4	4	16	28	4.200.000	1	Laptop, ATK, printer	-
11	Reviu JKN	Reviu	Memberikan secara terbatas atas dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan	Irban Wilayah 4	1	Minggu I Mei	Minggu II Mei	0	4	4	4	4	16	28	4.200.000	1	Laptop, ATK, printer	-
12	Reviu Kepentingan	Reviu	Optimalisasi Pencegahan Benturan Kepentingan	Inspektorat, UKPBJ, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Irban Khusus	1	Minggu I Juli	Minggu II Juli	0	4	4	4	4	16	28	4.200.000	1	Laptop, ATK, printer	-
13	Reviu Penerapan SPM	Reviu	Meningkatnya Kualitas SPM	Sekretariat Daerah	Irban Wilayah 1	2	Minggu I Juli, Minggu III Desember	Minggu II Juli, Minggu IV Desember	0	8	8	8	32	56	8.400.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
14	Reviu E-PURCHASE	Reviu	Meyakini Pelaksanaan PBJ Melalui E-PURCHASE	Sekretariat Daerah	Irban Khusus	1	Minggu II Mei	Minggu III Mei	0	4	4	4	4	16	28	4.200.000	1	Laptop, ATK, printer	-
15	Reviu Poksi Pengaduan	Reviu	Meningkatkan Sosialisasi dan Transparansi Pelayanan untuk menurunkan Persepsi Korupsi	Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PAM)	Irban Khusus	1	Minggu I Agustus	Minggu II Agustus	0	4	4	4	4	16	28	4.200.000	1	Laptop, ATK, printer	-
16	Program Peningkatan Diverifikasi Ketahanan Masyarakat	Reviu HPS	Menilai HPS, telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/ KAK serta ruang lingkup pekerjaan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Irban Khusus	1	Minggu I Februari	Minggu II Februari	0	4	4	4	4	16	28	4.200.000	1	Laptop, ATK, printer	Sedang
17	Program Penyelenggaraan Jalan (Peningkatan Jalan Sagitsi - Beriulou	Reviu HPS	Menilai HPS, telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/ KAK serta ruang lingkup pekerjaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Irban Khusus	1	Minggu II Februari	Minggu III Februari	0	4	4	4	4	16	28	4.200.000	1	Laptop, ATK, printer	Tinggi
18	Penedyiaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Pembangunan Jalan Tani dan Jaringan Irigasi)	Reviu HPS	Menilai HPS, telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/ KAK serta ruang lingkup pekerjaan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Irban Khusus	1	Minggu III Februari	Minggu IV Februari	0	4	4	4	4	16	28	4.200.000	1	Laptop, ATK, printer	Sedang

19	Program Penyelenggaraan Jalan (Pembangunan Jalan (Ic) atau Beton Kurus Subelen - Muara Salibi)	Reviu HPS	Menilai HPS, telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/ KAK serta ruang lingkup pekerjaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Irban Khusus	1	Minggu IV Februari	Minggu I Maret	0	4	4	4	4	16	28	4.200.000	1	Laptop, ATK, printer	Tinggi
20	Reviu Kepatuhan P3DN	Reviu	Meningkatnya Kepatuhan belanja barang dan jasa SKPD terhadap Produk Dalam Negeri	Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Irban Khusus	2	Minggu IV Juli	Minggu I Agustus	0	8	8	8	32	56	8.400.000	4	Laptop, ATK, printer	-	
21	Reviu DAK	Reviu	Meningkatnya Akurasi dan Pengalokasian Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dinas Perikanan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan	Irban Wilayah 1,2 dan 4	9	Minggu I Februari, Minggu II Juli, Minggu III Oktober	Minggu II Februari, Minggu III Juli, Minggu IV Oktober	0	36	36	36	144	252	37.800.000	9	Laptop, ATK, printer	-	
22	Reviu RENSTRA OPD	Reviu	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Rencana Strategis SKPD	Seluruh OPD	Irban Wilayah 1, 2, 3, 4	4	Minggu I Oktober	Minggu II Oktober	0	16	16	16	64	112	16.800.000	35	Laptop, ATK, printer	-	
23	Reviu PBJ oleh APIP	Reviu	Meningkatnya Kualitas PBJ	Sekretariat Daerah	Sekretariat	4	Minggu III Maret, Minggu III Juni, Minggu III September dan Minggu III Desember	Minggu IV Maret, Minggu IV Juni, Minggu IV September dan Minggu IV Desember	0	16	16	16	16	64	9.600.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
24	Reviu Pelaksanaan dan Penganggaran yang Responsif (PPRG)	Reviu	Tersedianya Perencanaan dan Penganggaran yang berbasis gender (Responsive Gender)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Irban Wilayah 3	4	Minggu II April, Minggu I Juli, Minggu III Oktober, Minggu III Desember	Minggu III April, Minggu II Juli, Minggu IV Oktober, Minggu IV Desember	0	16	16	16	16	64	9.600.000	4	Laptop, ATK, printer	-	
25	Reviu Penutupan KAS	Reviu	Pemantauan Setoran UYHD OPD	Seluruh OPD	Irban Wilayah 1, 2, 3, 4	4	Minggu IV Desember	Minggu IV Desember	0	16	16	16	16	64	9.600.000	4	Laptop, ATK, printer	-	
26	Reviu Tata Kelola Layanan Perizinan	Reviu	Meningkatnya kualitas Layanan Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Irban Wilayah I	1	Minggu II Juni	Minggu III Juni	0	4	4	4	16	28	4.200.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
27	Evaluasi Tata Kelola Manajemen ASN	Evaluasi	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Manajemen ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Irban Wilayah 3	1	Minggu II Oktober	Minggu III Oktober	2	7	7	7	28	51	7.650.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
28	Evaluasi Hibah, Bansos, Subsidi	Evaluasi	Terselurkannya Tepat Sasaran dana hibah/ bansos	Setda, Dinas Perikanan, Dinas Perhubungan	Irban Khusus	1	Minggu II Desember	Minggu III Desember	2	7	7	7	28	51	7.650.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
29	Evaluasi ZI/WBK	Evaluasi	Optimalisasi Pembangunan Zona Integritas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Irban Khusus	1	Minggu I Juni	Minggu II Juni	2	7	7	7	28	51	7.650.000	2	Laptop, ATK, printer	-	

30	Evaluasi SAKIP OPD	Evaluasi	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	Seluruh OPD	Irban Wilayah 1, 2, 3, 4	4	Minggu II Februari	Minggu IV Maret	8	28	28	28	112	204	30.600.000	36	Laptop, ATK, printer	-
31	Evaluasi Penjaminan Kualitas terhadap PM SPIP OPD	Evaluasi	Meningkatnya Muturitas Pengendalian Pemerintah (SPIP) Pemda	Seluruh OPD	Irban Wilayah 1, 2, 3, 4	4	Minggu II Juni	Minggu III Juni	8	28	28	28	112	204	30.600.000	1	Laptop, ATK, printer	-
32	Evaluasi RR dan RTP	Evaluasi	Meningkatnya Kualitas Risk Register OPD dan Rencana Tindak Pengendalian	Seluruh OPD	Irban Wilayah 1, 2, 3, 4	4	Minggu III Februari	Minggu IV Februari	8	28	28	28	112	204	30.600.000	72	Laptop, ATK, printer	-
33	Evaluasi RB	Evaluasi	Optimalisasi Pembangunan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Irban Wilayah 3	4	Minggu II Januari, Minggu III April, Minggu IV Oktober	Minggu III Januari, Minggu IV Juli, Minggu I November	8	28	28	28	112	204	30.600.000	4	Laptop, ATK, printer	-
34	Evaluasi Telaah Sejawat Internal	Evaluasi	Meningkatnya APJP	Semua Wilayah	Irban Wilayah 1, 2, 3, 4	4	Minggu IV Juni	Minggu I Juli	4	28	28	28	112	200	30.000.000	4	Laptop, ATK, printer	-
35	Monitoring Inflasi atau Pemantauan Harga	Monitoring	Pemantauan Stabilisasi Harga Bahan Pokok Daerah	Tim Penanganan Inflasi Daerah	Irban Wilayah 4	4	Minggu III April, Minggu I Juli, Minggu II Oktober, Minggu I Desember	Minggu IV April, Minggu II Juli, Minggu III Oktober, Minggu II Desember	8	28	28	28	112	204	30.600.000	4	Laptop, ATK, printer	-
36	Program Pengelolaan Pendidikan	Monitoring	Pemantauan Dana BOS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Irban Wilayah 2	1	Minggu I Juli	Minggu II Juli	2	5	5	5	20	37	39.937.000	1	Laptop, ATK, printer	Tinggi
37	Monitoring TLHP BPK RI	Monitoring	Meningkatnya Penyelesaian TLHP BPK RI	Seluruh OPD	Sekretariat	2	Minggu I Juni dan Minggu II November	Minggu II Juni dan Minggu III November	4	6	6	6	24	46	46.720.000	2	Laptop, ATK, printer	-
38	Monitoring TLHP APJP	Monitoring	Meningkatnya Penyelesaian TLHP APJP	Seluruh Desa	Irban Wilayah 1, 2, 3, 4	8	Minggu I Juni, Minggu IV April, Minggu I November,	Minggu II Juni, Minggu I Mei, Minggu II November	4	40	40	40	160	284	297.704.000	8	Laptop, ATK, printer	-
39	Dinas Kesehatan	Monitoring dan Elaborasi Stunting	Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Intervensi Stunting	Dinas Kesehatan	Irban Wilayah 4	1	Minggu IV Oktober	Minggu I Mei	2	5	5	5	20	37	39.937.000	1	Laptop, ATK, printer	Tinggi
40	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat	Audit Ketaatan	Meningkatnya Kepatuhan atas Layanan Kesehatan Masyarakat/ BOK	Dinas Kesehatan	Irban Wilayah 4	1	Minggu II Mei	Minggu IV Mei	5	20	20	20	80	145	92.508.000	1	Laptop, ATK, printer	Tinggi
41	Program Pemberdayaan Sosial	Audit Kinerja	Meningkatkan 3E dengan Pengentasan Kemiskinan	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Irban Wilayah 1	1	Minggu I Mei	Minggu III Mei	5	20	20	20	80	145	92.508.000	1	Laptop, ATK, printer	Sedang
42	Malakopa	Pemeriksaan Desa	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Malakopa Pagai Selatan	Irban Wilayah 1	1	Minggu III Juli	Minggu I Agustus	2	7	7	7	28	51	57.165.000	1	Laptop, ATK, printer	Tinggi

59	Sirilogui	Pemeriksaan Desa	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Desa	Kualitas Keuangan Desa	Desa Sirilogui Siberut Utara	Irban Wilayah 4	1	Minggu III Juli	Minggu I Agustus	2	7	7	7	28	51	44.042.000	1	Laptop, ATK, printer	Sedang
60	Muara Sikabalu	Pemeriksaan Desa	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Desa	Kualitas Keuangan Desa	Desa Sikabalu Siberut Utara	Irban Wilayah 4	1	Minggu II September	Minggu IV September	2	7	7	7	28	51	55.898.000	1	Laptop, ATK, printer	Sedang
61	Malancan	Pemeriksaan Desa	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Desa	Kualitas Keuangan Desa	Desa Malancan Siberut Utara	Irban Wilayah 4	1	Minggu II September	Minggu IV September	2	7	7	7	28	51	44.042.000	1	Laptop, ATK, printer	Sedang
62	Penedyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Jaringan Irigasi)	Probit Audit	Meningkatkan Pengawasan dalam Proses PBJ	Pengawasan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Irban Wilayah 3	3	Minggu III Maret (Persiapan) Minggu I September (pelaksanaan) Minggu II Novemeber (Serah terima)	Minggu IV Maret (Persiapan) Minggu II September (pelaksanaan) Minggu III Novemeber (Serah terima)	5	15	15	15	60	110	49.140.000	3	Laptop, ATK, printer	Tinggi
63	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	PDTT	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan	Pengaduan Masyarakat	Irban Wilayah 1, 2, 3, 4	4	Minggu I Januari	Minggu IV Desember	20	60	60	60	240	440	66.000.000	4	Laptop, ATK, printer	-
64	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	PDTT	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan	Pengaduan Masyarakat dan PKKN	Irban Khusus	6	Minggu I Januari	Minggu IV Desember	30	90	90	90	360	660	354.450.000	6	Laptop, ATK, printer	-
65	Pendampingan Penyusunan Risk Register dan RTP	Consulting	Meningkatnya Pendampingan Penyusunan Risk Register dan RTP	dalam Register	Seluruh OPD	Sekretariat	1	Minggu I Februari	Minggu II Februari	2	5	5	5	20	37	5.550.000	36	Laptop, ATK, printer	-
66	Pendampingan Zona Integritas	Consulting	Mewujudkan Zona Integritas menuju WBK/WBEM	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Irban Khusus	1	Minggu I Juni	Minggu IV Juni	2	5	5	5	20	37	5.550.000	2	Laptop, ATK, printer	-	
67	Penilaian APIP	Consulting	Meningkatkan APIP	Inspektorat	Sekretariat	1	Minggu III Juni	Minggu IV Juni	2	5	5	5	20	37	5.550.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
68	Pendampingan MCP KPK, SPI, UPG, LHKPN	Consulting	Meningkatnya Pendampingan MCP KPK pada OPD	Seluruh OPD	Irban Khusus	2	Minggu I Januari-Minggu IV Juni	Minggu I Januari-Minggu IV Juni	4	10	10	10	40	74	11.100.000	2	Laptop, ATK, printer	-	
69	Pendampingan SPIP Terintegrasi	Consulting	Meningkatnya Kualitas SPIP Terintegrasi	Seluruh OPD	Sekretariat	1	Minggu IV April	Minggu I Mei	2	5	5	5	20	37	5.550.000	1	Laptop, ATK, printer	-	

70	Koordinasi Pengawasan APiP	Consulting	Meningkatkan Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan oleh APiP	Inspektorat	APiP	13	Minggu I Januari	Minggu IV Desember	65	65	65	65	130	390	359.138.000	1	Laptop, ATK, printer	-
----	----------------------------	------------	---	-------------	------	----	------------------	--------------------	----	----	----	----	-----	-----	-------------	---	----------------------	---

